**EKSISTENSI TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
PELALAWAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT**

Oleh : Maharani

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah, SH., M.Kn

Alamat : Jl. Cendrawasih Gg. Nikmat, Tangkerang Tengah, Pekanbaru

Email : maharanirahman1@gmail.com- Telepon : 0852-6529-4454

ABSTRACT

The existence of customary law communities is recognized in Article 18B and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution. However, there are still actions that can reduce this right, namely the Forestry Law which categorizes Customary Forest under State Forest. This has resulted in a conflict between the two forests. On this matter, the Constitutional Court issued Constitutional Court Decision Number 35 / PUU-X / 2012 recognizing the rights of indigenous peoples to their customary forests. This recognition is provided as long as in reality the customary law community concerned still exists and its existence is recognized. The objectives of this thesis are: First, the existence (existence) of the customary land of the Muara Sakal customary law community (Muaro Sako) in Pelalawan Regency after the Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012; Second, the inhibiting factor for the existence of the ulayat lands of the customary law community of Muara Sakal (Muaro Sako) in Pelalawan Regency the legal efforts made to maintain the existence of these ulayat lands.

This type of research can be classified as a sociological juridical research type, because in this study the author directly conducted research at the location or place being studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Customary Law Community of Muara Sakal (Muaro Sako), in Langgam Village, Langgam District, Pelalawan Regency. The data sources used were primary data, secondary data, tertiary data with interview data collection techniques and literature study.

Conclusions can be drawn, first, the existence / existence of the customary law community community rights in Muara Sakal, Langgam sub-district, Pelalawan district, this is indicated by the existence of the customary law community Muara Sakal as the subject of customary rights, there is still Muara Sakal customary land as the object of customary rights, and still there is a relationship between the subject and the object of customary rights. Second, the absence of a Regional Regulation or Regent Decree that provides legal certainty and regulates the protection of customary rights in Pelalawan Regency, especially the ulayat rights / ulayat land of the Muara Sakal customary community (Muaro Sako), as well as the Muara Sakal customary law community have made a number of legal efforts. to obtain legal certainty in the protection and recognition of their customary rights, but it has yet to produce results.

Keywords: Existence - customary rights - Muara Sakal customary community

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan salah satu aset Negara Indonesia yang sangat mendasar, karena Negara dan bangsa hidup dan berkembang di atas tanah, masyarakat Indonesia memposisikan tanah pada kedudukan yang sangat penting, karena merupakan faktor utama dalam peningkatan produktivitas agraria.¹ Tanah sebagai sumber hidup patut dihormati dan dilindungi agar hidup manusia dapat terjamin.²

Secara kultural tanah bagi masyarakat hukum adat bermakna *religio magis*, yaitu pemberian tuhan yang harus dipelihara dan dijaga sebaik-baiknya. Jadi, tanah bagi masyarakat hukum adat setidaknya mempunyai lima makna, yaitu *religio-magis*, eksistensi diri, kohesi sosial, akar kultural, dan aset ekonomi.³

Masyarakat hukum adat memiliki hak-hak terhadap yang seharusnya dilindungi oleh negara, salah satunya adalah tanah yang berada dalam wilayah lingkungan masyarakat hukum adat. Wilayah tersebut disebut tanah ulayat yang di atasnya terdapat hak ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak didalam lingkungan wilayahnya.⁴ Hak ulayat terdiri atas tanah dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, padang penggembalaan, pemakaman, kolam, sungai, dan hutan seisinya.⁵

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Pasal 18B dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Pasal 18B menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Adapun Pasal 28 I ayat (3) pada prinsipnya penghargaan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat hukum adat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia dengan persyaratan.

Pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Salah satu hal yang berpotensi mereduksi hak-hak masyarakat hukum adat atas hak ulayat mereka yakni terkait kehutanan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut UU Kehutanan) menyatakan bahwa, “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat adat.” Lebih lanjut pada Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menegaskan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Konsekuensi logis dari status hutan adat sebagai hutan negara yakni terbukanya peluang bagi negara untuk mengeluarkan izin-izin hak atas tanah diatas hutan adat tersebut, misalnya hak guna usaha. Hingga kemudian dilakukan beberapa kali permohonan uji materi UU Kehutanan terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK).⁶

¹ Hayatul Ismi, “Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No. 1, hlm. 3.

² Ferry Aries Suranta, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat : Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 1.

³ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Prenadamedia, Jakarta: 2018, hlm. 2

⁴ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta: 2008, hlm. 185.

⁵ Sukirno, *Op.cit.*

⁶ Daisyita Mega Sari dan Akhyaroni Fu'adah, “Peran Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 1, Maret 2014, hlm. 56-57

Dari permohonan uji materi UU Kehutanan tersebut menuai hasil Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 (yang selanjutnya disebut Putusan MK 35). Putusan MK 35 tersebut menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, dan hutan negara yang dimaksud dalam UU Kehutanan, tidak termasuk hutan adat dan bahwa "...negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat." Berdasarkan putusan tersebut maka hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara.⁷

Secara umum konflik yang melibatkan hak ulayat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) konflik vertikal antara masyarakat hukum adat dan pemerintah dan investor; (2) konflik horizontal antara masyarakat hukum adat satu sama lainnya.⁸ Salah satu konflik tanah ulayat bersifat vertikal yaitu Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako) Suku Mandailing di Pelalawan dan memiliki tanah ulayat kurang lebih seluas 15.987 Ha yang terletak di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut:⁹

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bandar Sei Kijang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Langgam
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Rantau Baru
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Buluh Nipis

Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako) telah menggarap dan bercocok tanam dengan membuat ladang dan kebun, mengambil hasil hutan, hasil sungai atau rawa-rawa, berburu dan sebagainya, asal hasilnya diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarga.

Sekitar akhir tahun 2003, diluar sepengetahuan dan/atau dengan tanpa memberitahu dan/atau seizin Masyarakat Hukum Adat Muaro Sako, Tanah Ulayat Muaro Sako dikuasai oleh PT. Rimbun Sawit Sejahtera (selanjutnya disebut PT.RSS) dan PT. Nusa Prima Manunggal (selanjutnya disebut PT. NPM) dengan cara penyerobotan yang kemudian diatas tanah tersebut ditanami pohon akasia. Kemudian pada tahun 2008, Tanah Ulayat tersebut ditanami pohon kelapa sawit hingga sekarang. Tanah ulayat masyarakat hukum adat Muaro Sako yang dikuasai dan PT. NPM lebih kurang seluas 5.605 Ha terletak di dua tempat yaitu 1.816 Ha terletak di Areal Kalapas I dan 3.789 Ha terletak di Areal Kalapas II.¹⁰

PT. Rimbun Sawit Sejahtera (selanjutnya disebut PT. RSS) sebelumnya bernama PT. Raja Garuda Mas Sejati yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan berdasarkan Surat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 92/Mentanhut-VII tanggal 9 Oktober 2000.¹¹ PT. RSS mengelola objek sengketa berdasarkan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 791/Kpts-II/91 tanggal 29 Oktober 1991 tentang pelepasan sebagian kelompok hutan S. Kelapas dan sekitarnya yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar seluas 11.975 Ha untuk budidaya karet dan coklat atas nama PT. Raja Garuda Mas Sejati.¹²

Penanaman pohon akasia yang kemudian ditanami kembali kelapa sawit oleh PT. RSS berdasarkan adanya pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah negara seluas kurang lebih 12.270,50 Ha yang terletak di Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Langgam, Kampar.¹³ Setelah terbentuk Kabupaten Pelalawan pada 12 Oktober 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar,¹⁴ objek sengketa terletak di

⁷ Mega Dwi Yulyandini, "Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", *Jurnal-Diction*, Universitas Airlangga, Vol.1 No. 1, September 2018.

⁸ Sukirno, *Op.cit.* hlm. 3.

⁹ Wawancara dengan Ibu Lombok, Anggota Anak Tuo Padusi Batin Muara Sakal (Muaro Sako), Hari Sabtu, 5 Oktober 2019, Bertempat di Kediaman Ibu Lombok di Desa Lubuk Ogung, Langgam.

¹⁰ Wawancara dengan Datuk H. Zarmi, Batin Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako), Hari Sabtu, 24 Oktober 2019, Bertempat di Kediaman Datin Lombok di Muara Sakal (Muaro Sako), Langgam.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Wawancara dengan Ibu Lombok, *Op.Cit.*

¹⁴ <https://pelalawankab.go.id/portal/sekilas-pelalawan> diakses pada 11 November 2019

Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam berada pada wilayah Kabupaten Pelalawan.

Penjelasan Umum II angka (3) UUPA menyatakan, kepentingan masyarakat hukum adat harus mengalah pada kepentingan nasional yang lebih luas. Tetapi secara tegas dinyatakan pula, bahwa hal itu tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. Pemberian suatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan, sebelumnya didengar pendapatnya dan akan diberi “*recoqnisi*” yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat.¹⁵

Kiranya kesepakatan yang diusahakan untuk dicapai melalui musyawarah itu tidak hanya mengenai bentuk dan besar kerugian sebagai imbalan yang akan diberikan kepada pemegang hak ulayat. Pertama-tama kesepakatan itu juga mengenai kesediaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk menyerahkan sebagian tanah ulayat yang diperlukan itu kepada pihak yang memerlukannya. Tidak dibenarkan adanya paksaan, diluar acara pencabutan hak, dalam memperoleh tanah yang bersangkutan.¹⁶

Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan setelah Putusan MK 35 menyatakan “Penguasaan hutan oleh negara tetap harus memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.¹⁷

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan setelah Putusan MK 35 menyatakan “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.¹⁸ Apabila dalam perkembangannya

masyarakat hukum yang bersangkutan adat tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tetap dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat beralih menjadi hutan negara.¹⁹

PT. RSS dan PT. NPM telah menjanjikan apabila perusahaantunya dapat beroperasi atau berusaha di Tanah Ulayat Muara Sakal (Muara Sako) akan diberikan kompensasi. Namun sampai saat ini kedua perusahaan tersebut belum memberikan kompensasi kepada Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muara Sako).²⁰

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan eksistensi (keberadaan) tanah masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) setelah adanya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 dengan judul: **“Eksistensi Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Pelalawan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi (keberadaan) tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012?
2. Apa saja faktor penghambat eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan dan upaya hukum yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi tanah ulayat tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui keberadaan (eksistensi) tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012;
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan upaya hukum yang dilakukan untuk

¹⁵ Budi Harsono, *Op.cit*, hlm. 195.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wawancara dengan Ibu Lumbut, *Op.Cit.*

mempertahankan eksistensi tanah ulayat tersebut.

2) Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

a. Bagi penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait dengan eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

b. Bagi Dunia Akademik

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Agraria khususnya dalam kaitannya dengan eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muara Sako) di Kabupaten Pelalawan pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.

c. Bagi Instansi

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada Lembaga Adat Melayu Riau khususnya Lembaga Adat Petalangan dan masyarakat hukum adat di Kabupaten Pelalawan dalam eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Ulayat

Kepustakaan hukum adat menyebutkan istilah hak ulayat dipakai untuk menerjemahkan *beschikkingsrecht* dari Van Vollenhoven dan muridnya Ter Haar. Istilah hak ulayat lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dan sebagai ahli hukum adat dan hukum agraria, sedangkan ahli hukum adat lainnya seperti Soepomo menggunakan hak pertuanan, M.M.

Djojodigoeno dan Iman Sudiyat memakai istilah hak purba.²¹

Cornelis Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Maria S.W Sumardjono, merumuskan hak ulayat sebagai hak yang dimiliki oleh suatu masyarakat hukum adat (suku, desa, serikat desa) untuk menguasai seluruh tanah seisinya di dalam lingkungan wilayahnya. Dengan demikian maka subyek dari hak ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik yang tunggal maupun persekutuan daerah, tetapi tidak merupakan hak dari individu, dan juga menurut Ardiwilaga merupakan hak dari individu suatu famili.²²

Mochtar Kusumatmadja sebagaimana dikutip oleh Siti Hapsah Isfardiyana²³, mengemukakan secara yuridis hak ulayat merupakan suatu hak yang melekat sebagai kompetensi khas yang ada pada masyarakat hukum adat berupa kewenangan maupun kekuasaan untuk mengurus dan mengatur tentang tanah dan tanamannya dengan berlaku kedalam maupun keluar masyarakat hukum adat merupakan hak mutlak (absolut). Kekuatan berlaku ke dalam, berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan keluar berhubungan dengan bukan warga masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing.²⁴

Inti dari hak ulayat adalah bahwa komunitas secara keseluruhan menentukan bagaimana tanah yang ditempati oleh komunitas atau masyarakat hukum adat. Keputusan ini bukanlah keputusan yang dapat diambil oleh setiap anggota masyarakat hukum adat, terlepas dari hubungannya dengan tanah tersebut. Otoritas masyarakat hukum adat dalam hal ini mencakup semua aspek penggunaan dan

²¹ Sukirno, *Op.cit.* hlm. 26.

²² Robert Kurniawan Ruslak Hammar, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Calpulis, Yogyakarta: 2017, hlm. 20.

²³ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, UII Press, Yogyakarta: 2018, hlm. 121.

²⁴ Boedi Harsono, *Op.cit.* hlm. 186.

keterasingan, baik kepada orang-orang didalam ataupun diluar masyarakat hukum adat.²⁵

Hak ulayat diakui keberadaannya sepanjang kenyataannya masih ada. Hal ini diketahui dari kenyataan 1) masih adanya suatu masyarakat hukum adat tertentu, 2) masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat hukum adat tersebut, dan 3) masih ada kepala adat yang pada kenyataannya dan diakui oleh para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban tugas kewenangan masyarakat adatnya, mengelola, mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama tersebut.²⁶ Disamping diakui, pelaksanaan hak ulayat dibatasi, dalam arti sedemikian rupa sehingga sesuai kepentingan nasional dan negara, berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan di Republik Indonesia.²⁷

Tetapi didalam Penjelasan Umum II angka (3) UUPA secara tegas dinyatakan pula, bahwa hal itu tidak berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali. Pemberian suatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar pendapatnya dan akan diberikan "recognitie" yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat.²⁸

Penyediaan tanah ulayat dan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya. Musyawarah tersebut mendahului perbitan surat izin perolehan dan pemberian hak atas tanah oleh instansi yang berwenang. Kesepakatan musyawarah merupakan syarat bagi

penerbitan surat izin dan keputusan pemberian hak yang bersangkutan.²⁹

Tanggung jawab terhadap hak ulayat tetap menjadi tanggung jawab masyarakat hukum adat, berkewajiban memelihara dan mempertahankan hak ulayat. Setiap masyarakat hukum adat akan membuat batas-batas wilayahnya masing-masing untuk memelihara dan mempertahankan wilayahnya. Batas biasanya hanya berupa batas-batas alami seperti gunung, sungai, danau, dan lain sebagainya.³⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.³¹

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³²

²⁵ Timothy Lindsey, "Square Pegs & Round Holes: Fitting Modern Title into Traditional Societies in Indonesia", 7 Pac. Rim L. & Pol'y J. 699, 1998, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 1 November 2019

²⁶ Boedi Harsono, *Op.cit*, hlm. 192.

²⁷ Robert Kurniawan Ruslak Hammar, *Op.cit*, hlm. 21-22

²⁸ Boedi Harsono, *Op.cit*. hlm. 195.

²⁹ *Ibid*. hlm. 199.

³⁰ Siti Hapsah Isfardiyana, *Op.cit*, hlm. 123

³¹ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

³² Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.³³

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini dirasa perlu untuk memberikan definisi dari beberapa konsep yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan tersebut.³⁴
2. Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia yang bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, mendiami wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan kekuasaan, memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup,

³³ R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PKM/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol. 13 No. 02 Juni 2016, hlm. 194.

³⁴ *Ibid.*

serta tidak mempunyai keinginan untuk untuk memisahkan diri.³⁵

3. Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.³⁶
4. Hak ulayat adalah kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah dalam wilayah tersebut demi kelangsungan hidup dan kehidupan yang secara khas timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun, dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya.³⁷
5. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat tertentu.³⁸
6. Muara Sakal (Muaro Sako) adalah Desa di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.
7. Kabupaten Pelalawan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau.³⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologi.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Pelalawan, yaitu Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako), di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.

3) Populasi dan sampel

a. Populasi

- 1) Tokoh Adat Muara Sakal (Muaro Sako)

³⁵ Dominikus Rato, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2011, hlm. 82.

³⁶ Pasal 1 angka 6 Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

³⁷ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Prenadamedia, Jakarta: 2014, hlm. 123.

³⁸ Penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

³⁹ <https://pelalawankab.go.id/portal/sekilas-pelalawan> diakses pada 11 November 2019

- 2) Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako)
- 3) Ketua Lembaga Adat Melayu Riau
- 4) Ketua Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pelalawan

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Tokoh Adat Muara Sakal	7	4	57,14%
2.	Masyarakat Hukum Adat Sakal	114	6	5,26 %
3.	Ketua LAM Riau	1	1	100 %
4.	Ketua BPN Pelalawan	1	1	100 %
Jumlah		123	12	-

Sumber Data: Data Primer olahan Tahun 2019

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Data Sekunder

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- e) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat;
- f) Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;
- g) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak;
- i) Surat Edaran Menteri Kehutanan No: SE.1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanggal 16 Mei 2013.

2) **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3) **Bahan Hukum Tersier**, bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara
- 2) Studi pustaka

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako) Di Kabupaten Pelalawan Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 Tentang Hutan Adat

a. Sejarah Hutan Tanah Wilayah di Pelalawan

Masyarakat Petalangan bermukim dalam kawasan tertentu yang mereka sebut kawasan "*Hutan Tanah Wilayah*" atau "*Hutan Tanah Wilayah Perbatinan*" atau "*Hutan Tanah Wilayah Pesukuan*" atau "*Hutan Tanah Soko*" yang masing-masing Pesukuan menjadikannya sebagai "*Hutan tanah milik Pesukuan*" yang mereka warisi turun temurun. Pada masa Sultan Jaafar (1886-1872 M), menegaskan pembagian hutan tanah di Kerajaan Pelalawan, antara lain:⁴⁰

- 1) Seluruh "Hutan Tanah Perbatinan" yang disebut "Perbatinan Kurang Esa Tigapuluh" tetaplah menjadi hak milik mereka turun temurun, dan Sultan selain mengukuhkannya dengan "Surat Keterangan Hutan Tanah" turun pula mengawasinya agar tidak diperjual-belikan ke pihak lain.
- 2) Tanah-tanah yang belum mempunyai, terutama yang terletak di Pesisir sungai Kampar hingga ke kualanya, diberikan kepada "Rakyat Bawaan" dan Orang-orang Besar Kerajaan Pelalawan. Tanah ini boleh dimiliki turun temurun seperti "Hutan Tanah Wilayah Petalangan", ada yang bersifat sementara dan ada yang sekedar menggarap saja. Hutan tanah ini tidak dapat diperjual-belikan ke pihak luar, kecuali atas persetujuan Sultan. Terhadap tanah

ini juga diberikan "Surat Keterangan Hutan Tanah" kepada pemiliknya masing-masing. Hutan tanah ini disebut "Tanah Ayat" atau Tanah Kayat".

- 3) Tanah-tanah dan tanah baru, serta tanah yang tidak termasuk dalam "Hutan Wilayah Perbatinan" dan "Tanah Ayat" atau "Tanah Kayat" menjadi milik pribadi Sultan dan keluarganya, dan boleh diberikan kepada siapa saja. Tanah inilah yang diberikan Sultan kepada keluarga atau kerabat terdekatnya, atau digarap oleh anggota masyarakat yang memerlukan.

Perlu diketahui, bahwa "Surat Keterangan Hutan Tanah" atau "Geran Sultan" yang diberikan Raja Pelalawan kepada setiap Perbatinan, berdasarkan kepada "Tombo" atau "Terombo" masing-masing pesukuan (Perbatinan). Sedangkan "Surat Keterangan Hutan Tanah" yang diberikan kepada Orang-orang Kerajaan anggota masyarakat diluar Petalangan tidaklah memerlukan "Tombo", tetapi kepada siapa saja yang menerimanya diwajibkan untuk menyimpan dan memegang surat tersebut sebagai "Tombo" bagi anak susunya, sepanjang belum ada pembatalan atau pencabutan dari Sultan atau sepanjang surat dimaksud masih berlaku, atau sesuai dengan hak yang diberikan kepada penerima surat tersebut. Didalam ketentuan adat Kerajaan Pelalawan, Sultan Boleh memberikan atau "mengkarunia" atau "menganugerahkan" hutan tanah miliknya kepada siapa saja yang dipandang patut untuk menerimanya.⁴¹

Pebatinan di Pelalawan terdiri dari 29 terdiri atas 29 Batin yang tersebar di seluruh Kabupaten Pelalawan yang disebut *Pebatinan Kuang Oso Tigopuluh* Selain itu juga terdapat 10 Batin/Penghulu Kehormatan yang merupakan anugerah dari Sultan. Tanah ulayat hanya dimiliki oleh Batin yang diwariskan turun temurun, sedangkan Penghulu tidak memiliki tanah ulayat. Batin-batin kehormatan hanya memiliki tanah ulayat yang diperoleh dari pemberian Batin lain atau pemberian Sultan.

⁴⁰ Tenas Effendy, dkk, *Op.cit.*, hlm. 121-122.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 122-124

b. Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal

Asal muasal ulayat Batin Muara Sakal merupakan pemberian (hibah) dari yang dihibahkan oleh Batin Mudo Langkan Segati pada zaman dulu dan diwariskan secara turun temurun sampai sekarang, kebenaran hal inipun diperkuat berdasarkan Surat Keterangan Perihal Kebenaran Hibah tertanggal 20 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Pemangku Adat Batin Mudo Langkan Segati Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Langgam Kecamatan Langgam, Pemangku Adat Rantau Baru Kecamatan Langgam, dan Pemangku Adat Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, Kampar, yang didalamnya menerangkan bahwa Masyarakat hukum adat Muara Sako memiliki tanah ulayat satu hamparan dengan Wilayah Kebatinan Muara Sako.⁴²

“Dari bakal Paku Tiari melalui tepian umbai menuju Pematang Piabung turun ke Teluk Lindung Bulan menyeberang sungai Kampar Kiri melalui Kempas Anggas menyeberang sungai Kampar Kanan menuju kuala sungai Kelapas. Dari kuala sungai Kelapas mudik sampai guguk sungai Kelapas Kanan meniti pematang sampai kehulu sungai Musi anak sungai Kampar Menuju Teluk Jao sipinggir sungai Kampar. Dari teluk Jao melalui genting danau Sarang Unggas menuju ujung Rasau Panjang dipinggir sungai Segati selanjutnya mengikuti sungai Segati sampai kembali ke bakal Paku Tirai.”

Luas tanah ulayat secara keseluruhan masyarakat hukum adat Muara Sakal ± 15.987 Ha (lima belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh hektare). Namun yang tersisa saat ini ± 10.922 Ha, meliputi hutan, tanah, danau, sungai, anak sungai, dan lopak yang terdapat dalam bidang wilayah Muara Sakal yang batas-batasnya terdiri dari batas atau tanda tanda alam. Tanah ulayat tersebut sebagain darinya sudah dimanfaatkan untuk kepentingan lahan pertanian dan perkebunan oleh Masyarakat adat Batin Muara Sakal dan sebagiannya

masih alami berbentuk hutan adat dan terpelihara dengan baik.⁴³

Tapal batas tanah ulayat Batin Muara Sakal ditentukan kembali melalui musyawarah adat pada tanggal 24 Mei 2004, dengan menghadirkan 4 (empat) narasumber utama diantaranya Wahab selaku Antan-antan Batin Ajo Segati, Bujang Baru selaku Batin Mudo Langkan Segati, Nawawi selaku Datuk Sati Rantau Baru, dan Wan Jalil selaku Datuk Engku Lelo Putera Langgam, dan 10 tokoh adat serta anak kemenakan Batin Muara Sakal, dengan hasil kesimpulan kemudian dibuat Sket Peta Wilayah Batin Muara Sakal dan tidak dapat dipindahkan atau diganggu gugat karena tapal batas tersebut sudah dibuat sejak berdirinya Kerajaan Batin Ajo Segati berkisar Abad ke-13 M. Sehingga tapal batas tersebut dapat sebagai berikut:⁴⁴

Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai Kelapas Kanan dan Guguk Sungai Musi;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Segati;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Rantau Baru;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.

Selain itu, pada 28 Februari 2009 juga dilaksanakan kembali musyawarah untuk menentukan tapal batas menurut adat (sejarah) dan pemerintah di wilayah dusun Muara Sako yang dihadiri oleh Datuk Rajo Bilang Bunsu, Datuk Antan-Antan, Datuk Lelo Putra, dan Lurah Langgam. Hasil musyawarah tersebut sebagai berikut : “Sesuai dengan sejarah yang dilengkai dengan tombo dan benda pusaka yang ada bahwa batas Muara Sako dengan Bulu Nipis, yaitu sebelah Kampar Kanan sehingga seberas-beras sungai pincuran (yaitu dalam sungai kalapas).”

Pemegang kekuasaan tertinggi atas hak ulayat Muara Sako adalah Batin Muara Sakal. Setiap anggota masyarakat hukum adat Muara Sakal berhak untuk berusaha dan memungut hasil hutan, tanah, suak, sungai, danau, lopak, dan lain-lain dalam tanah ulayat Muara Sako dengan tetap mengikuti peraturan

⁴² Wawancara dengan Datuk H. Zarmi, *Op.Cit.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

hukum adat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Ketua suak sungai Uwagh-Uwagh diketuai oleh Sumondo Tuo dan tidak membayar uang masuk. Anak Jantan kalau ada peluang di Kualo Uwagh-uwagh boleh masuk tetapi lebih diutamakan dulu untuk Sumodo. Sumodo yang berada diluar kampung boleh masuk Kualo Uwagh-uwagh selama mematuhi adat dalam kampung. Apabila terjadi pelanggaran tentang hukum adat Suak Sungai dalam anak kemenakan maka akan diselesaikan secara kekeluargaan.⁴⁶

Pelelangan suak sungai dilakukan sekali dalam setahun yang ditentukan oleh musyawarah Batin Muara Sakal dan perangkatnya, baik sistem, acara dan besar nilai lelangnya. Anak Jantan, Anak Padusi, dan Sumondo Batin Muara Sakal diperbolehkan berusaha di dalam hak ulayat Muara Sakal. Khusus Kualo Uwagh-uwagh hasil lelang adalah hak pribadi Batin Muara Sakal.⁴⁷

Bagi pihak ketiga, baik orang perorangan maupun usaha yang berusaha didalam hak ulayat Muara Sakal wajib melapor dan mendapat izin dari Batin Muara Sakal dan perangkat adat baik lisan ataupun tertulis sesuai kepentingan dan kapasitasnya. Pihak ketiga diwajibkan menampung tenaga lokal atas kegiatan usahanya yaitu anak kemenakan Batin Muara Sakal sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Pihak ketiga diwajibkan mematuhi dan menghormati norma-norma dan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal masyarakat hukum adat Muara Sakal.⁴⁸

Masyarakat hukum adat Muara Sakal melalui Batin Muara Sakal berhak memperoleh bagian atau pancung alas atas pemanfaatan hak ulayat Muara Sakal dalam bentuk sumber daya alam apapun oleh

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Wawancara dengan Datuk Izan Abadi, selaku Sumando Tuo Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako), Hari Sabtu, 11 Juli 2020, bertempat di Muara Sakal (Muaro Sako), Langgam.

⁴⁷ Wawancara dengan Datuk M. Rizwan, selaku Panglimo Putih Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal (Muaro Sako), Hari Sabtu, 11 Juli 2020, bertempat di Muara Sakal (Muaro Sako), Langgam

⁴⁸ *Ibid.*

pihak ketiga, baik diatas maupun dibawah tanah (hasil tambang, migas dan minerba) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sesuai hasil kesepakatan Batin Muara Sakal dan perangkat adatnya dengan pihak ketiga tersebut secara musyawarah untuk mufakat dengan perjanjian tertulis.⁴⁹

Pada tahun 2003 tanah/wilayah adat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muaro Sako) telah dikuasai secara melawan hukum oleh PT. Rimbun Sawit Sejahtera dan PT. Nusa Prima Manunggal dengan cara ditanami pohon akasia dan kemudian pada tahun 2008 sampai dengan sekarang tanah/wilayah adat tersebut ditanami pohon kelapa sawit dengan luas $\pm$ 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektare) yang terletak pada dua tempat yakni pada Areal Kalapas I Muara Sako Kelurahan Langgam Kecamatan Langgam seluas $\pm$ 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektare) dan Areal Kelapas II Desa Lubuk Ogong Kecamatan Sei Kijang seluas $\pm$ 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektare). Penguasaan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari masyarakat hukum adat Muara Sakal, sehingga tanah sejumlah $\pm$ 5.605 Ha tersebut masih dalam sengketa sampai saat ini. Selain itu hingga saat ini, masyarakat hukum adat Muara Sako juga tidak diberikan *recognisi* yang memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat oleh kedua perusahaan tersebut.⁵⁰

Dikeluarkannya Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 menjadi harapan bagi masyarakat adat di Indonesia tak terkecuali masyarakat adat Muara Sako untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam mempertahankan hak-haknya. Ternyata putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tidak juga memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Muara Sako atas hak-haknya. Pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, masyarakat adat Muara Sako hingga saat ini belum juga mendapatkan kejelasan mengenai eksistensi tanah wilayah hak ulayatnya yang masih tersisa yang meliputi hutan adat, tanah, danau, sungai, anak

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid.*

sungai, dan lopak yang masih terpelihara dengan baik.

Berdasarkan konsep Hak Ulayat, menurut Maria S.W. Sumardjono, hak ulayat dikatakan ada jika memenuhi indikator atau kriteria sebagai berikut.⁵¹

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Senada dengan Maria S.W. Sumardjono, Boedi Harsono mengemukakan ada 3 unsur pokok yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya suatu hak ulayat disuatu tempat tertentu, yaitu :⁵²

1. Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasa terkait tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari;
2. Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
3. Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya yaitu adanya tatanan hukum adat tentang pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayatnya masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum yang bersangkutan.

⁵¹ Ade Saptomo, *Op.Cit.*

⁵² Boedi Harsono dalam Tim Penelitian Universitas Lambung Mangkurat, *Laporan Hasil Penelitian "Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan"*, Banjarmasin: Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, 2009, hlm. 10.

Berpijak pada indikator atau kriteria tersebut, masyarakat hukum adat Muara Sako memenuhi semua kriteria tersebut. Persyaratan pertama untuk mengakui hak ulayat, yaitu masih terdapat masyarakat hukum adat subjek hak ulayat, jika diaplikasikan kepada hak ulayat Muara Sako dapat dilihat masyarakat hukum adat Muara Sakal berkedudukan di Kelurahan Langgam, Kecamatan Langgam dan masih terikat tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya peraturan adat mengenai pernikahan.

Masyarakat hukum adat Muara Sako dipimpin oleh seorang batin dengan gelar Batin Muara Sako. Gelar Batin Muara Sakal ini dipakai berdasarkan tomo adat yang sudah ada tertanggal 4 Rabiul awal 1314 H, dan saat ini merupakan Batin yang ke-12. Dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya Batin Muara Sako dibantu oleh pemangku dan perangkat adat yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Masyarakat hukum adat Muara Sako memiliki peradilan adat dan sanksi adat dalam menyelesaikan sengketa yang masih ditaati.

Pengakuan keberadaan Batin Muara Sako dapat dilihat dalam Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor 03/SK/TBKP/2016 tentang Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan di Kabupaten Pelalawan tertanggal 1 April 2016 menyebutkan Batin Muara Sakal (Muara Sako) yang terletak di Muara Sako Kec. Langgam termasuk kedalam Batin Kehormatan (Anugerah Sulthan).

Kemudian syarat yang kedua, tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat. Masyarakat hukum adat Muara Sako masih terdapat tanah ulayat Muara Sakal meliputi hutan, tanah, danau, sungai, anak sungai, dan lopak, yang terdapat dalam bidang wilayah Muara Sakal yang batas-batasnya terdiri dari batas atau tanda tanda alam. Tanah ulayat tersebut sebagian darinya sudah dimanfaatkan untuk kepentingan lahan pertanian dan perkebunan oleh masyarakat adat Muara Sako dan sebagiannya masih alami berbentuk hutan adat dan terpelihara dengan baik.

Selanjutnya syarat yang ketiga, hubungan antara subjek dan objek hak ulayat ulayat. Pemegang kekuasaan tertinggi atas hak ulayat Muara Sakal adalah Batin Muara Sakal. Setiap anggota masyarakat hukum adat Muara Sakal berhak untuk berusaha dan memungut hasil hutan, tanah, suak, sungai, danau, lopak, dan lain-lain dalam tanah ulayat Muara Sako dengan tetap mengikuti peraturan hukum adat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan hukum adat mengenai tanah ulayat, meliputi peraturan mengenai suak sungai, ketentuan adat dalam pemanfaatan hasil hutan, dan peraturan mengenai hubungan dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat Muara Sako memenuhi indikator dan persyaratan yang menjadi tolak ukur diakinya tanah ulayat, namun eksistensi/keberadaan masyarakat hukum adat Muara Sako dan tanah ulayatnya belum mendapat pengakuan. Hingga saat ini yang berwenang untuk menentukan lolos dan tidaknya syarat-syarat tersebut diatas adalah ditangan pemerintah, masyarakat hukum adat tidak dapat berbuat apa-apa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Keberadaan/eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Muara Sakal Kelurahan Langgam Kabupaten Pelalawan hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat subjek hak ulayat yaitu masyarakat hukum adat Muara Sakal yang masih terikat tatanan hukum adatnya yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; masih terdapat objek hak ulayat yaitu tanah ulayat Muara Sakal meliputi hutan, tanah, danau, sungai, anak sungai, dan lopak; serta masih terdapat hubungan antara subjek dan objek hak ulayat ulayat artinya tanah masih diatur oleh lembaga adat yang ada di kampung masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako).
2. Faktor penghambat eksistensi tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muaro Sako) di Kabupaten Pelalawan yaitu belum adanya Peraturan Daerah atau Surat Keputusan

Bupati yang memberikan kepastian hukum dan mengatur perlindungan hak ulayat di Kabupaten Pelalawan khususnya hak ulayat/tanah ulayat masyarakat adat Muara Sakal (Muaro Sako); dan upaya hukum yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi tanah ulayatnya Masyarakat hukum adat Muara Sakal telah melakukan telah melakukan sejumlah upaya hukum seperti musyawarah, Gugatan, Banding dan Peninjauan Kembali (*request civil*) untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengakuan hak ulayat mereka, namun belum membuahkan hasil.

B. Saran

1. Agar tokoh-tokoh adat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muaro Sako) segera mengusulkan Peraturan daerah kepada Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan Peraturan Daerah tentang pengakuan keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat Muara Sakal (Muaro Sako) sbegaia tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.
2. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten perlu segera membentuk tim identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya dan hasil verifikasi dapat diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sebagai pemberi kepastian hukum atas hak mereka serta sebagai landasan legal bagi masyarakat hukum adat untuk mulai mengelola hutan dan lahan adatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendy ,Tenas, ddk, 2005, *Lintas Sejarah Pelalawan (Dari Pekantua Ke Pelalawan)*, Pangkalan Kerinci: Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
- Hammar, Robert Kurniawan Ruslak, 2017, *Penataan Ruang Berbasis Kearifan Lokal; Implikasi Penataan Ruang Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*, Yogyakarta: Calpulis.

Harsono, Budi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.

Isfardiyana, Siti Hapsah, 2018, *Hukum Adat*, Yogyakarta: UII Press.

Kansil, C.S.T., et. all, , 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Pide, Suriyaman Mustari, 2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia.

Rato, Dominikus, 2011, *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Sukirno, 2018, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, Jakarta: Prenadamedia.

Suranta, Ferry Aries, 2012, *Penggunaan Lahan Hak Ulayat : Dalam Investasi Sumber Daya Alam Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Gramata Publishing.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

B. Jurnal/Skripsi/Kamus/Makalah

Daisyita Mega Sari dan Akhyaroni Fu'adah, 2014, "Peran Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", *Jurnal Penelitian Hukum*, Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 1.

Hayatul Ismi, "Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.3 No. 1.

Mega Dwi Yulyandini, 2018, "Wewenang Tidak Langsung Negara Terhadap Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012", *Jurnal-Diction*, Universitas Airlangga, Vol.1 No. 1.

R. Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asa Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PKM/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Penguji Undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Vol. 13 No. 02.

Timothy Lindsey, "Square Pegs & Round Holes: Fitting Modern Title into Traditional Societies in Indonesia", 7 *Pac. Rim L. & Pol'y J.* 699, 1998, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> pada tanggal 1 November 2019

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat;

D. Website/Internet

<https://pelalawankab.go.id/portal/sekilas-pelalawan> diakses pada 11 November 2019